



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BONE

TAHUN 2018 - 2023



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaannya jualan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 dapat diselesaikan.



RENSTRA ini dibuat sebagai tindak lanjut untuk mendukung visi dan misi yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati yang baru terpilih yaitu Dr. H. A. FAHSAR MAHDIN PADJALANGI, M.Si. dan Drs. H. AMBO DALLE, M.M. sebagai Bupati Bone dan Wakil Bupati Bone masa bakti 2018 – 2023. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya visi, misi, tujuan maupun sasaran maka perlu perencanaan yang baik, akuntabel dan komprehensif.

Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan yang bersifat indikatif. Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Renstra-PD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya Renstra Perangkat Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone diharapkan bisa memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat direalisasikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bone selama masa 5 (lima) Tahun kedepan.

Watampone, 16 April 2019

Kepala Dinas

Ir. WAHIDA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19681130 199403 2 007

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.BONE	5
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	5
2.1.1. Tugas dan Fungsi	5
2.1.2. Struktur Organisasi	11
2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan	14
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	25
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	26
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	27
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	28
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	28
3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.....	29
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	30

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone.....	30
3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	34
4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	34
4.2. Sasaran Pembangunan Jangka Panjang	34
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	36
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	38
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	48
BAB VIII. PENUTUP	49
8.1. Pedoman Transisi	49
8.2. Kaidah Pelaksanaan	49

DAFTAR TABEL

		HALAMAN
TABEL 2.1	Struktur Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	14
TABEL 2.2	Struktur Diklat PIM	14
TABEL 2.3	Jumlah Jabatan Struktural	15
TABEL 2.4	Struktur Pegawai Menurut Tingkat Kepangkatan dan Golongan	15
TABEL 2.5	Distribusi Sumberdaya Pegawai	16
TABEL 2.6	Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone	17
TABEL 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2012 - 2017	18
TABEL 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2012 - 2017	20
TABEL 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan Perikanan Kab.Bone	35
TABEL 5.1	Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan	36
TABEL 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bone	39
TABEL 7.1	Indikator Tujuan / Sasaran	48

DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
GAMBAR.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone	13
GAMBAR.2 Komposisi SDM PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 sebagai sebuah Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023.

Renstra adalah merupakan pedoman dalam menyusun rencana kerja yang memuat tujuan, sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman Perencanaan dalam Penyelenggaraan pembangunan daerah bidang kelautan dan perikanan Tahun 2018-2023 yang harus ditaati dan merupakan solusi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu yang akan datang.

Dokumen Renstra ini melalui sinkronisasi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi selatan tahun 2018-2023 serta Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone dengan menghasilkan penjabaran dalam Rencana Strategis (RESTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone capai pembangunan periode 2018 - 2023 dibuat secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut akan menghasilkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2023.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone yang akan disusun setiap tahun

sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang teruang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan dan Perikanan.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Kelautan dan Perikanan kabuapten Bone sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Struktur Organisasi dan Tata Kerja, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Tahapan Penyusunan Recana Strategis (Renstra) adalah Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan Forum Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan akhir dan Penetapan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63 / Permen-KP / 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
16. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012 – 2032.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 - 2023 dimaksudkan untuk menjabarkan visi dan misi Bupati Bone Tahun 2018 - 2023 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan dan menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 ke dalam rencana instansional;

Adapun tujuan Renstra Dinas Tahun 2018 - 2023 adalah untuk :

- a. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
- b. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
- c. Memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan dan sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.
- d. Menjadi acuan dan pedoman Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bone Periode 1 Tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 - 2023 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

Pada Bab I Pendahuluan : berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra dan Sistematika Penulisan Renstra.

Pada Bab II, Gambaran Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan, berisi uraian gambaran umum terhadap keberadaan Perangkat Daerah, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, yang terdiri atas uraian Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada Bab III, Permasalahan dan Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, telaahan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada Bab IV, Tujuan dan Sasaran berisi tentang Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah, Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah;

Bab V, Strategi dan Arah Kebijakan, berisi tentang Rumusan Pernyataan strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Lima Tahun mendatang;

BAB VI, Rencana Program, Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan berisi uraian rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatifnya yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2018 - 2023 dan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang akan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam bentuk indikator kinerja hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program-program pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan;

Bab VII, Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan, berisi tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan Kinerja yang dapat dicapai dalam 5 Tahun mendatang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD;

Bab VIII adalah merupakan Penutup yang terdiri atas Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dan dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bone Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan daerah sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan daerah;

- b. pembinaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan daerah kepada masyarakat;
- c. penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan Kelautan dan Perikanan kepada Kabupaten/Kota dan mitra di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- e. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- f. penyampaian laporan hasil evaluasi saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Adapun tugas dan fungsi satu eselon di bawah kepala dinas diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan. Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan anggaran belanja Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. pengkoordinasian tugas-tugas pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di Kelautan dan Perikanan;
- c. penghimpunan bahan untuk penyusunan peraturan-peraturan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan dan pengelolaan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. pelaksanaan pembinaan staf; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

2. Bidang Kenelayanan

Bidang Kenelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan program Kenelayanan. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan memfasilitasi program Bidang Kenelayanan;
- b. perencanaan Program Bidang kenelayanan;
- c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan diklat dan pendampingan nelayan, iptek, dan informasi kenelayanan serta pembinaan kelembagaan nelayan;
- d. pengevaluasian dan melaporkan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang Kenelayanan;
- e. pelaporan laporan kinerja Bidang Kenelayanan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidayaan Ikan

Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan program Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidayaan Ikan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidayaan Ikan;
- b. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan Diklat dan Pendampingan Pembudidayaan Ikan, Akses Iptek dan Informasi Pembudidayaan Ikan, Pembinaan Kelembagaan dan Pembudidayaan Ikan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan;
- d. pelaksanaan laporan kinerja Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidayaan Ikan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

4. Bidang Jasa Usaha Perikanan

Bidang Jasa Usaha Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memfasilitasi jasa usaha perikanan. Bidang Jasa

Usaha Perikanan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program Bidang Jasa Usaha Perikanan;
- b. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan dan Penerbitan TPUPI dan TPKPIH dan Penerbitan Bukti Pencatatan, Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;
- c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang Jasa Usaha Perikanan;
- d. pelaksanaan laporan kinerja Bidang Jasa Usaha Perikanan;
- e. pemberian rekomendasi dan layanan perizinan usaha Pembudidayaan ikan, penerbitan TPUPI dan TPKPIH dan Penerbitan Bukti Pencatatan, Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- b. pelaksanaan pembinaan kawasan perikanan budidaya, Kesehatan ikan dan lingkungan budidaya, Teknologi Budidaya dan produksi;
- c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- d. pelaksanaan laporan kinerja Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugasnya.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan didukung oleh 2 (dua) UPTD yakni UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lonrae dan UPTD Balai Benih Ikan (BBI). Namun seiring dengan perubahan regulasi, 2 (dua) UPTD tersebut harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone membentuk 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) kelas A dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Ikan dan Pengembangan Budidaya (BBIPB)
 - (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan memberikan pembinaan pengelolaan UPT Balai Benih Ikan dan Pengembangan Budidaya.
 - (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pembenihan dan percontohan budidaya ikan air tawar, uji laboratorium tentang kesehatan ikan dan lingkungan;
 - b. Pelaksanaan promosi dan penjualan benih dan calon induk ikan air tawar serta ikan konsumsi dengan teknologi cara budidaya ikan yang baik (CBIB);
 - c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pembenihan, percontohan budidaya ikan air tawar dengan teknologi cara budidaya ikan yang baik (CBIB) serta uji laboratorium tentang kesehatan ikan dan lingkungan kepada dinas;
 - d. Pelaksanaan kerjasama dengan bidang terkait.
- b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan struktur yang terdiri dari :
 - (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan memberikan pembinaan pengelolaan UPT Tempat Pelelangan Ikan.
 - (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pelelangan dan pemasaran ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - b. Penanganan hasil tangkapan di Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. Pelaksanaan tugas koordinasi dengan koordinator wilayah kerja TPI yang ada di kecamatan;
 - d. Pengumpulan dan pengolahan data produksi hasil penangkapan ikan di TPI;
 - e. Pelaporan hasil penyelenggaraan TPI kepada kepala dinas;

- f. Pelaksanaan tugas pembantuan atau pendelegasian kewenangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.

2.1.2. Struktur Organisasi

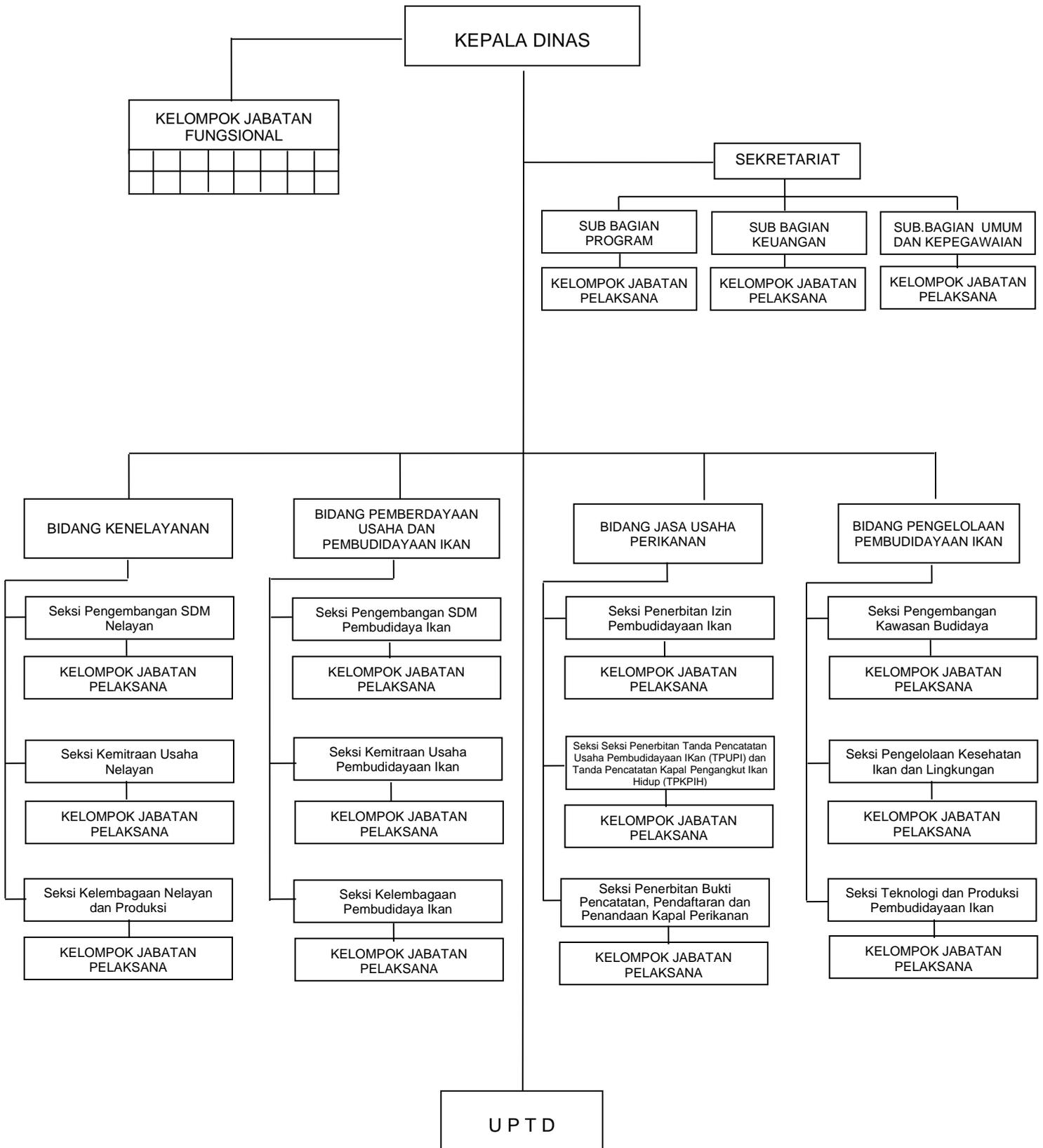
Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan termasuk kategori tipe A dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretaris, dengan 3 sub bagian,
 - Sub Bagian Program
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Kepala Bidang Kenelayanan, dengan 3 seksi,
 - Seksi Seksi Pengembangan SDM Nelayan
 - Seksi Kemitraan Usaha Nelayan
 - Seksi Kelembagaan Nelayan dan Produksi
- d. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidayaan Ikan, dengan 3 seksi,
 - Seksi Pengembangan SDM Pembudidaya Ikan
 - Seksi Kemitraan Usaha Pembudidayaan Ikan
 - Seksi Kelembagaan Pembudidaya Ikan
- e. Kepala Bidang Jasa Usaha Perikanan, dengan 3 seksi,
 - Seksi Penerbitan Izin Pembudidayaan Ikan
 - Seksi Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH)
 - Seksi Penerbitan Bukti Pencatatan, Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan.
- f. Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan 3 seksi,
 - Seksi Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya
 - Seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 - Seksi Teknologi dan Produksi Pembudidayaan Ikan

- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Ikan dan Pengembangan Budidaya (BBIPB) dengan struktur yang terdiri dari :
 - Kepala UPT;
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan struktur yang terdiri dari :
 - Kepala UPT
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional
 1. Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelas dari struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone maka dapat dilihat pada skema berikut ini :

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone



2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, saat ini didukung oleh :

a. Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Tahun 2018 tercatat sebanyak 49 orang, dengan tingkat pendidikan bervariasi dari Sekolah Dasar (SD) sampai Magister Sains (S2). Adapun Strukturnya sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Struktur Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	S3	-	-	-
2.	S2	9	13	22
3.	S1	4	7	11
4.	Sarjana Muda	2	1	3
5.	SLTA	7	6	13
6.	SLTP	-	-	-
7.	SD	-	-	-
	Jumlah	22	27	49

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Tahun 2018

b. Tingkat Penjenjangan dan Eselon

Tingkat penjenjangan yang telah diikuti oleh pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone yang mulai dari Diklat PIM IV sampai dengan Diklat PIM II. Adapun strukturnya sebagai berikut :

Tabel.2.2.
Struktur Diklat PIM

No.	Diklat	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	Diklat PIM II	-	1	1
2.	Diklat PIM III	3	1	4
3.	Diklat PIM IV	4	11	15
	Jumlah	7	13	20

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Tahun 2018

**Tabel.2.3.
Jumlah Jabatan Struktural**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	4	1	5
3	Eselon IV	7	12	19
	Jumlah	11	14	25

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Tahun 2018

a. Pangkat dan Golongan

Tingkat kepangkatan dan golongan pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone bervariasi dari Golongan II sampai Golongan IV, adapun strukturnya sebagai berikut :

**Tabel.2.4.
Struktur Pegawai Menurut Tingkat Kepangkatan dan Golongan**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Golongan IV/d	-	-	-
2	Golongan IV/c	-	1	1
3	Golongan IV/b	1	-	1
4	Golongan IV/a	3	4	7
5	Golongan III/d	2	4	6
6	Golongan III/c	4	9	13
7	Golongan III/b	6	3	9
8	Golongan III/a	4	-	4
9	Golongan II/d	-	-	-
10	Golongan II/c	3	4	7
11	Golongan II/b	-	-	-
12	Golongan II/a	-	1	1
13	Golongan I/d	-	-	-
14	Golongan I/c	-	-	-
15	Golongan I/b	-	-	-
16	Golongan I/a	-	-	-
	Jumlah	23	26	49

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Tahun 2018

b. Distribusi Sumberdaya Pegawai

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone terdiri atas 4 bidang teknis, Sekretariat. Pada unit tersebut telah terdistribusi pegawai dengan jumlah sumberdaya kepegawaian sebagai berikut :

Tabel. 2.5
Distribusi Sumberdaya Pegawai

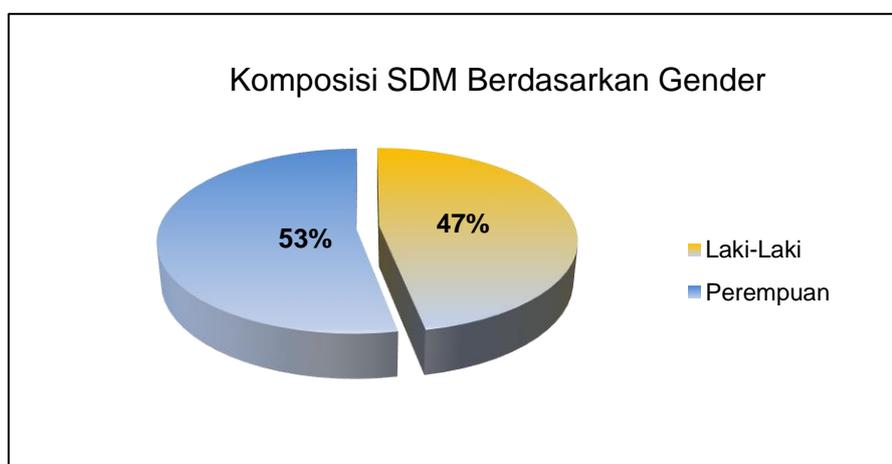
No.	Bidang / Unit	PNS		Jumlah	Tenaga Kontrak		Jumlah
		Jenis Kelamin			Jenis Kelamin		
		Pria	Wanita		Pria	Wanita	
1.	Kenelayanan	4	4	8	1	2	3
2.	Pemberdayaan Usaha dan Pembudidaya Ikan	1	6	7	-	2	2
3.	Jasa Usaha Perikanan	6	2	8	-	1	1
4.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2	5	7	1	1	2
5.	Sekretariat	6	8	13	3	5	8
6.	UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2	-	2	15	-	15
7.	UPT BBI dan Pengembangan Budidaya	2	-	2	4	1	5
	Jumlah	23	25	48	24	12	36

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Tahun 2018

Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

- Laki-laki sebanyak 23 orang
- Perempuan sebanyak 26 orang

Gambar 2. Komposisi SDM PNS berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Bone Tahun 2018

2.2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone

Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 2.6
Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

No.	Sarana dan Prasarana yang digunakan	Kondisi		Jumlah	Ket.
		Baik	Kurang Baik		
1 .	Mobil Operasional	Ya		4 Unit	
2.	Motor Operasional	Ya		74 Unit	
3.	Komputer PC	Ya		13 Unit	
4.	Laptop/Notebook	Ya		14 Unit	
5.	Meja Kerja	Ya		36 Buah	
6.	Kursi Kerja	Ya		65 Buah	
7.	Mesin Ketik	Ya		7 Unit	
8.	AC	Ya		15 Unit	
9.	Printer	Ya		13 Unit	
10.	Kantor Operasional			3 Unit	Kantor Dinas, UPT TPI dan UPT BBIPB

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bone 2012 – 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone 2012-2017

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Produksi Perikanan (Ton)				199.877,7	205.955,4	212.222,6	218.645,3	350.433,4	220.842,8	274.948,8	277.608,3	316.956,6	367.623,0	1,1	1,3	1,3	1,4	1,05
	a Produksi Tangkap (Ton)				70.513,4	72.609,2	74.767,6	76.950,6	40.117,4	26.178,3	33.641,3	34.628,7	36.478,6	44.622,7	0,37	0,46	0,47	0,47	1,1
	b Perikanan Budidaya (Ton)				129.364,3	133.346,2	137.455,0	141.694,7	310.316,0	194.664,5	241.307,5	242.979,6	280.478,0	323.000,3	1,5	1,8	1,77	1,98	1,04
2.	Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)				47,3	47,7	48,1	48,5	48,9	45,5	52,97	56,25	56,51	56,86	0,96	1,1	1,16	1,16	1,2
3.	Capaian Bina Kelompok (%)																		
	a Jumlah kelompok mendapat bantuan sarana dan prasarana (klp)																		
	- Kelompok Usaha Bersama (KUB)				30	31	32	32	10	103	84	10	20	14	3,43	2,70	0,31	0,62	1,4
	- Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)				11	11	11	11	20	90	80	96	55	60	8,2	7,3	8,64	5	3

	- Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar)				10	14	15	17	-	14	10	5	2	-	1,4	72	0,3	0,1 2	-
	b Jumlah kelompok yang dibangun dan berkembang (klp)																		
	- Kelompok Usaha Bersama (KUB)				193	209	225	244	228	217	226	237	237	226	1,1 2	1,0 8	1,0 5	0,9 7	0,9 9
	- Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)				329	336	343	350	522	340	504	512	563	601	1,0 3	1,5	1,4 9	1,6 0	1,1 5
	- Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar)				79	80	82	83	-	86	127	113	105	-	1,0 8	1,5 8	1,3 7	1,2 6	-
4.	Kontribusi Produksi Perikanan (%)																		
	a Produksi Perikanan dari Kelompok (Ton)																		
	- KUB (Ton)				35.256 ,7	36.304 ,6	37.383 ,8	38.475 ,3	20.058, 7	18.324, 8	23.548 ,9	24.240, 1	25.535 ,0	31.235 ,9	0,5	0,64	0,64	0,66	1,55
	- Pokdakan				90.554 ,80	93.342 ,20	96.218 ,50	99.186 ,50	217.221 ,20	136.265 ,2	168.91 2,4	170.08 5,7	196.33 4,6	231.65 0,8	1,2 0	1,2 0	1,1 8	1,2 3	0,9 2
	b Jumlah Produksi Benih Ikan BBI Amali (Ekor)				150.0 00	255. 000	433,5 00	736.9 50	1.252, 815	27.500	45.34 0	107.00 0	166.6 00	665.0 00	0,1 83	0,1 78	0,2 4	0,2 2	0,5 3
	c. Jumlah produksi ikan olahan (Ton)				2.727 ,1	2.78 1,6	2.837 ,8	2.893 ,9	-	2.668, 3	2.948 ,8	3.037, 26	3.128, 38		0,9 7	1,0 6	1,1 0	1,0 8	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5.	Terbayarnya Jasa Telpon ,Air dan Listrik (Jenis)				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1
6.	Prosentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi (%)				63	66	69	73	77	63	66	69	73	77	1	1	1	1	1
7.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)				-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1
8.	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan (Jenis)				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1
9.	Prosentase Pelaksanaan Administrasi pengelolaan keuangan (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
10.	Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1
11.	Kebutuhan pelaksanaan administrasi perkantoran (bulan)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
12.	Jumlah aparatur dinas (PNS/Non PNS) yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (orang)				-	-	-	-	90	-	-	-	-	90	-	-	-		1
13.	Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun (jenis)				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1

14.	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit)				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
15.	Persentase gedung kantor dinas yang berfungsi dengan baik (%)				75	80	85	90	95	75	80	85	90	95	1	1	1	1	1
16.	Tingkat pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor (%)				100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	1	1	1	1	-
17.	Tingkat Pemenuhan alat tulis kantor , baarang cetakan ,[enggandaan , makanan dan minuman selama 1 tahun (%)				-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18.	Updating dokumen data base tindak lanjut intervensi program dan kegiatan(dokumen)				-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
19.	Prosentase kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur (%)				65	70	75	80	85	65	70	75	80	85	1	1	1	1	1
20.	Prosentase Jumlah gedung kantor Dinas (%)				75	80	85	90		75	80	85	90		1	1	1	1	
21.	Persentase kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1

Dari tabel 2.7 di atas, terlihat bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir memberikan pencapaian pada aspek peningkatan produksi hasil budidaya perikanan dan angka konsumsi ikan per kapita Kabupaten Bone. Untuk bidang budidaya, peningkatan produksi banyak dipengaruhi oleh trend pengembangan budidaya rumput laut dimana produk rumput laut menjadi salah komoditas unggulan yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Disamping itu komoditas budidaya yang lain yang juga memberikan kontribusi terhadap meningkatnya produksi budidaya antara lain bandeng dan udang vaname. Keberhasilan pencapaian kinerja juga terjadi pada aspek peningkatan angka konsumsi ikan Kabupaten Bone. Angka konsumsi ikan per kapita Kabupaten Bone bahkan dapat melampaui angka konsumsi ikan nasional. Tahun 2017 misalnya, angka konsumsi ikan Kabupaten Bone sebesar 56,86 kg / per kapita / tahun lebih tinggi dari angka konsumsi nasional yang hanya sebesar 43,94 kg / per kapita / tahun.

Untuk produksi perikanan tangkap selama 5 (lima) terakhir tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya sumber daya perikanan akibat kerusakan lingkungan maupun aktifitas penangkapan ikan yang berlebihan (*over fishing*). Sementara di sisi lain juga diperhadapkan pada persoalan keterbatasan anggaran untuk pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan, peningkatan sumber daya nelayan maupun pemanfaatan teknologi pada penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Untuk pencapaian bina kelompok sangat dipengaruhi oleh kemampuan penganggaran dan prioritas pembangunan daerah, terutama besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor kelautan dan perikanan.

Produktifitas Balai Benih Ikan (BBI) Amali cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2015 dan 2016 produksi benih ikan air tawar belum bisa mencapai target, namun tahun 2017 produksi benih ikan air tawar mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas kelautan dan perikanan Kab Bone Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 8.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bone Tahun 2012-2017

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan	196.000.000	242.000.000	250.000.000	270.000.000	270.000.000	196.013.000	268.990.000	250.560.000	271.125.000	276.920.000	1,0001	1,1115	1,0022	1,0042	1,0256	27	29
- DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- PAD	196.000.000	242.000.000	250.000.000	270.000.000	270.000.000	196.013.000	268.990.000	250.560.000	271.125.000	276.920.000	1,0001	1,1115	1,0022	1,0042	1,0256	27	29
Total Belanja	10.398.816.100	10.278.505.686	12.811.666.100	12.637.402.100	11.883.564.200	9.804.546.790	9.587.294.886	12.549.664.403	12.479.701.036	11.234.935.775	0,9429	0,9328	0,9795	0,9875	0,9454	12	13
- Belanja Pegawai	2.844.353.200	2.660.622.400	3.010.381.600	3.475.532.000	3.596.685.000	2.673.601.685	2.642.164.092	3.034.193.913	3.360.853.404	3.310.652.196	0,9400	0,9931	1,0079	0,9670	0,9205	21	19
1. Tidak Langsung	2.732.613.200	2.510.682.400	2.741.491.600	3.082.242.000	3.144.185.000	2.562.461.685	2.506.644.092	2.765.853.913	2.970.263.404	2.881.452.196	0,9377	0,9984	1,0089	0,9637	0,9164	13	11
2. Langsung	111.740.000	149.940.000	268.890.000	393.290.000	452.500.000	111.140.000	135.520.000	268.340.000	390.590.000	429.200.000	0,9946	0,9038	0,9980	0,9931	0,9485	75	74

– Belanja Barang dan Jasa	3.583.483.15 0	3.869.100. 086	8.036.601. 500	6.655.507. 100	7.660.591. 550	3.510.552. 555	3.641.714. 394	7.936.067. 540	6.612.484. 632	7.542.132. 579	0,979 6	0,941 2	0,987 5	0,993 5	0,984 5	53	53
– Belanja Modal	3.970.979.75 0	3.748.783. 200	1.764.683. 000	2.506.363. 000	626.287.6 50	3.620.392. 550	3.303.416. 400	1.579.402. 950	2.506.363. 000	382.151.0 00	0,911 7	0,881 2	0,895 0	1,000 0	0,610 2	(534)	(84 7)

Dari tabel 2.8 di atas diperoleh gambaran bahwa rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikategorikan sangat baik dimana capaian untuk aspek pendapatan rata-rata melebihi 100 % dengan rata-rata pertumbuhan target 27 % dan 29 % realisasi. Untuk aspek belanja Dinas Kelautan dan Perikanan juga menghasilkan capaian yang baik dengan kisaran 93 – 98 % dengan rata-rata pertumbuhan target 12 % dan 13 %. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari kinerja aparatur dan komitmen berbagai stakeholder seperti penyuluh perikanan, pelaku usaha perikanan yang meliputi nelayan, pembudidaya maupun pengolah dan pemasar hasil perikanan. Ke depan dukungan pendanaan sangat dibutuhkan untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan, baik terkait perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone memiliki tantangan dan Peluang. Berdasarkan hasil analisis terhadap renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan yang berimplikasi terhadap perencanaan 5 (lima) Tahun kedepan.

2.4.1. Tantangan

- a. Akses modal pelaku sektor perikanan masih terbatas atau sulit mendapat modal usaha perikanan
- b. Sarana dan Prasarana perikanan dan Tangkap dan Pembudidayaan ikan masih terbatas sehingga pemanfaatan sumberdaya perikanan belum termanfaatkan secara optimal
- c. Dukungan Sumberdaya Manusia (SDM) pelaku utama sektor perikanan masih rendah
- d. Kurangnya koordinasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sektor perikanan dalam rangka penerapan berbagai peraturan.

2.4.2. Peluang

- a. Adanya dukungan pemerintah melalui regulasi dalam pengembangan usaha sektor perikanan
- b. Pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang optimal, berkelanjutan dan bertanggungjawab
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan
- d. Dukungan permodalan oleh pemerintah, swasta dan perbankan terhadap pelaku perikanan

BAB III
PERMASAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas
Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelayanan sektor kelautan dan perikanan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. **Lemahnya kemampuan pelaku usaha dibidang kenelayanan dalam kemandirian berwirausaha.** Perikanan tangkap merupakan sub sektor yang memberikan kontribusi bagi peningkatan produksi perikanan Kabupaten Bone. Tahun 2018, produksi perikanan tangkap berkontribusi 46.746,90 ton dari total produksi perikanan sebesar 403.643,80 ton (11,58 %). Permasalahan utama yang dihadapi pelaku usaha di bidang penangkapan ikan antara lain masih lemahnya kemampuan nelayan dalam kemandirian usaha terutama akses terhadap permodalan, akses informasi dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi penangkapan ikan. Ketergantungan terhadap bantuan pemerintah masih tinggi dalam hal pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan maupun akses informasi dan penerapan teknologi penangkapan ikan.
- b. **Masih rendahnya kemampuan berwirausaha bagi pembudidaya ikan secara berkelanjutan.** Perikanan budidaya menjadi andalan pengembangan sektor perikanan Kabupaten Bone ke depan. Sub sektor ini memberikan kontribusi 88,42 % (356.896,90 ton) terhadap produksi perikanan Kabupaten Bone tahun 2018. Produksi perikanan budidaya tersebut masih sangat mungkin untuk ditingkatkan mengingat potensi lahan budidaya (tambak, kolam, sawah dan perairan umum) masih belum dikelola secara optimal. Persoalan utama terkait pengembangan budidaya perikanan antara lain kondisi sarana dan prasarana budidaya yang belum memadai, masih rendahnya pemahaman dan penerapan cara budidaya ikan yang baik serta kurangnya kemampuan pembudidaya dalam mengakses permodalan.
- c. **Rendahannya legalitas berusaha bagi usaha perikanan.** Legalitas berusaha di sektor perikanan secara umum terbagi 2 (dua) yaitu Pertama, legalitas kelompok yang meliputi Pengukuhan Kelompok, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Badan Hukum (Akta Notaris dan Pendaftaran di Kemenkumham). Kedua, Legalitas Perizinan Berusaha yang

meliputi Izin Usaha (SIUP atau Tanda Daftar Usaha bagi pelaku usaha kecil) maupun Izin Operasional / Komersial seperti SIPI / SIKPI atau dokumen lain pengganti SIPI / SIKPI bagi nelayan kecil. Permasalahannya selama ini, pemahaman dan kesadaran pelaku usaha perikanan tentang pentingnya mengurus legalitas berusaha masih sangat rendah.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Sebagaimana telah diketahui bupati dan wakil bupati terpilih telah mencanangkan visi dan misi serta program strategi yang akan dilakukan selama masa pemerintahan 5 tahun kedepan adalah :

Visi jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 yaitu:

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Dalam rangka mencapai visi jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2018-2023, misi yang ditempuh sebagai berikut:

- Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- Misi 2 : Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Misi 3: Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
- Misi 4 : Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
- Misi 5 : Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
- Misi 6 : Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 tersebut, sektor kelautan dan perikanan akan berkontribusi pada pada pencapaian Misi 2 : Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan Misi 5 : Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Petumbuhan Ekonomi sektor Perikanan
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mempunyai visi 2015 – 2019 “**Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional**”. Visi KKP tersebut relevan dengan visi Kabupaten Bone dalam membangun kemandirian khususnya masyarakat kelautan dan perikanan.

Sedangkan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah :

1. **Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
 2. **Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
 3. **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan
- Misi ketiga, Kesejahteraan (*Prosperity*) sejalan dengan misi Kabupaten Bone dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
 - Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

- Penyesuaian kebijakan Indonesia Bersatu dan Kebijakan Prioritas yang termuat dalam Revisi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 yang berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan ke depan, dengan agenda pembangunan “**Kemaritiman**” sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan produksi perikanan dua kali lipat ;
 - 2) Peningkatan kapasitas dan pemberian akses terhadap sumber modal sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar ;
 - 3) Pemberian sarana produksi ;
 - 4) Terbangunnya sentra perikanan sebagai tempat pelelangan ikan terpadu ;
 - 5) Penerapan Best Aqua Culture prioritas untuk komoditas unggulan ;
 - 6) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Strategis ;
 - 7) Pemberantasan Illegal, Unregulated and Reported Fishing (IUU);
 - 8) Meningkatnya upaya pengawasan khusus wilayah kelautan guna mencegah illegal Fishing;
 - 9) Mengamankan sumberdaya alam dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) ;
 - 10) Bertambahnya kawasan konservasi perairan;
 - 11) Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan;

Dari 11 agenda pembangunan “kemaritiman” pada revisi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018, ada 2 (dua) agenda yang relevan dengan agenda pembangunan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Bone yaitu Peningkatan kapasitas dan pemberian akses terhadap sumber modal sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar dan Pemberian sarana produksi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone tahun 2012-2032, kawasan peruntukan perikanan terdiri atas :

a. Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap

Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada kawasan pesisir dan laut Kecamatan Kajuara, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Salomekko, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tonra, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Mare, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Sibulue, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Barebbo, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tanete Riattang Timur, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Awangpone, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tellu Siattinge, dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Cenrana dengan wilayah penangkapan mencakup kawasan perairan Teluk Bone berdasarkan cakupan batas wilayah kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. Kawasan Peruntukan Budidaya Perikanan

Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri dari:

- 1) Kawasan budidaya perikanan air tawar dengan luasan 1.121 (seribu seratus dua puluh satu) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bone Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Bone Utara, sebagian wilayah Kecamatan Bone Selatan, dan sebagian wilayah Kecamatan Bone Barat;
- 2) Kawasan budidaya perikanan air payau dengan luasan 15.244 (lima belas ribu dua ratus empat puluh empat) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajuara; dan
- 3) Kawasan budidaya perikanan air laut dengan luasan 101.638 (seratus satu ribu enam ratus tiga puluh delapan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian

wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajuara.

c. Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan, terdiri dari:

- 1) Pelabuhan Perikanan Ancu di Kecamatan Kajuara, Pelabuhan Perikanan Bulu-Bulu di Kecamatan Tonra, dan Pelabuhan Perikanan LonraE di Kecamatan Tanete Riattang Timur; dan
- 2) Rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan ditetapkan di Kecamatan Cenrana, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Ajangale, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Mare, Kecamatan Tonra, Kecamatan Salomekko, dan Kecamatan Kajuara.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023, dapat digambarkan keterkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

1. Dari 11 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi fokus perhatian pada perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan di Kabupaten Bone, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone dapat berkontribusi pada 6 (enam) tujuan, yakni :
 - a) (1) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
 - b) (2) Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
 - c) (3) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
 - d) (5) Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
 - e) (8) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
 - f) (12) Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

2. Dari 5 (lima) tujuan prioritas pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bone, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone dapat berkontribusi pada 3 (tiga) tujuan prioritas, yaitu :
 - a) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
 - b) Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
 - c) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
3. Sementara dari 8 (delapan) sasaran prioritas yang diusulkan, Dinas Kelautan dan Perikanan dapat berkontribusi pada 3 (tiga) sasaran yaitu :
 - a) Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
 - b) Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
 - c) Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
4. Dari Hasil Kajian Muatan KLHS, kajian status daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Bone telah dilakukan pada 2 indikator utama yaitu ketersediaan air dan ketersediaan pangan. Sektor Kelautan dan Perikanan memiliki keterkaitan yang besar dengan ketersediaan pangan. Walaupun kajian lebih fokus pada ketersediaan pangan dari sektor pertanian, tetapi sektor perikanan juga menjadi variabel penting yang mempengaruhi ketersediaan pangan terutama ketersediaan pangan berupa pemenuhan kebutuhan protein yang bersumber dari produksi perikanan.
5. Kajian perkiraan mengenai dampak resiko lingkungan dipertimbangkan berdasarkan resiko kejadian bencana dan tekanan

populasi penduduk. Hasil kajian resiko bencana di Kabupaten Bone, menunjukkan bahwa di Kabupaten Bone terdapat 7 jenis bahaya yang berisiko tinggi, yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan tanah longsor. Sektor Kelautan dan Perikanan akan terdampak pada jenis bencana banjir, banjir bandang dan cuaca ekstrim, terutama akan mempengaruhi penurunan produksi perikanan budidaya (gagal panen) dan produksi perikanan tangkap akibat berkurang aktifitas melaut. Sedangkan dampak resiko lingkungan dari tekanan populasi penduduk, sektor kelautan dan perikanan juga memiliki keterkaitan dengan peningkatan volume sampah domestik, pencemaran media air melalui peningkatan konsentrasi BOD, COD, dan TSS pada media air, pencemaran udara melalui peningkatan polutan CO, SO_x dan No_x, terutama untuk wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur dengan konsentrasi populasi nelayan yang cukup tinggi. Di samping itu tekanan penduduk juga akan meningkatkan alih fungsi penggunaan lahan, yakni alih fungsi hutan mangrove menjadi areal pertambakan yang akan mereduksi fungsi-fungsi ekologis dari hutan mangrove. Hal ini pasti menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi angka tingkat deforestasi kawasan hutan 0,23% dan aforestasi 0,16% di Kabupaten Bone.

6. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup menjadi isu yang menarik dalam sektor kelautan dan perikanan terutama kecenderungan meningkatnya limbah plastik di laut beberapa tahun terakhir. Hal ini memberikan dampak langsung terhadap masyarakat pesisir maupun kelestarian biota dan ekosistem pesisir. Permasalahan sampah plastik ini bahkan menjadi isu nasional dimana data menunjukkan bahwa Indonesia tercatat sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah China dan laut akan menerima dampak luar biasa jika tidak diambil langkah segera.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor perikanan

Sektor perikanan menjadi salah satu sektor yang menopang perekonomian Kabupaten Bone selain sektor pertanian dan kehutanan. Data BPS tahun 2017 menunjukkan, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berkontribusi sangat signifikan yakni 49,37 % terhadap PDRB Kabupaten Bone atau hampir separuh PDRB Kabupaten Bone disumbangkan oleh ketiga sektor tersebut. Pada tahun yang sama, perekonomian Kabupaten Bone tumbuh 8,43 %, walaupun mengalami penurunan dari tahun 2016 yang mencapai 9,01 %, tetapi angka tersebut masih jauh dari pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,07 %.

2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan kelautan dan perikanan

Akuntabilitas kinerja menjadi hal yang sangat penting mengingat paradigma tentang tata kelola pemerintahan yang sudah berubah menuju birokrasi yang efektif dan efisien untuk menjamin mutu pelayanan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

4.2 Sasaran Pembangunan jangka menengah

Sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam mencapai visi dan misi sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan

Produksi perikanan menjadi sasaran utama pembangunan sektor kelautan dan perikanan baik produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Peningkatan produksi perikanan diharapkan dapat menggerakkan perekonomian daerah dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Salah satu pilar pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah akuntabilitas. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone selaku perangkat daerah yang mempunyai mandat untuk menjalankan urusan kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bone pada sektor kelautan dan perikanan.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bone

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	2	3	4	5	6
			Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap (%)	1	1,2	1,4	1,6	1,8
			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	4	5	6	7	8
			Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya (%)	1	1,2	1,4	1,6	1,8
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan kelautan dan perikanan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP (Inspektorat Daerah)	CC	B	B	B	BB

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun 2018 – 2023 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018 – 2023 disajikan pada Tabel 5.1

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera			
Misi 2 : Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan <i>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Perikanan</i>	Sasaran <i>Meningkatnya Produksi Perikanan</i>	Strategi <i>Peningkatan kualitas SDM nelayan, pembudidaya ikan, kapasitas kelembagaan kelompok dan pola kemitraan pelaku usaha perikanan melalui pengembangan sarana dan prasarana usaha perikanan dan rekomendasi</i>	Arah Kebijakan <i>Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan penguasaan teknologi pelaku usaha perikanan</i>
			Arah Kebijakan <i>Peningkatan sarana dan prasarana usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan</i>
			Arah Kebijakan <i>Penguatan kapasitas kelembagaan pelaku usaha perikanan</i>
			Arah Kebijakan <i>Penguatan dan fasilitasi pelaku usaha perikanan dalam mengakses permodalan</i>
			Arah Kebijakan <i>Peningkatan pelayanan UPT TPI dan UPT BBIPB</i>
			Arah Kebijakan <i>Peningkatan upaya pemantauan terhadap kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan</i>
			Arah Kebijakan <i>Penyusunan master plan pengelolaan kawasan budidaya perikanan, Penetapan Kluster untuk pengembangan Budidaya Ikan berbasis Kawasan dan penyediaan database pembudidayaan ikan</i>

Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan kelautan dan perikanan	Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	Strategi Peningkatan kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah melalui pemenuhan layanan serta sarana dan prasarana pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Arah Kebijakan Memberikan Kecakupan Pemenuhan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air untuk mendukung admintrasi perkantoran
			Arah Kebijakan Melakukan kecukupan bahan, jasa dan alat kelengkapan perkantoran
			Arah Kebijakan Melakukan pelayanan admintrasi keuangan dan perkantoran yang transparansi dan akuntabel
			Arah Kebijakan Mendorong pengadaan Mutu Sarana dan Prasarana Pendukung Perkantoran
			Arah Kebijakan Mendorong kemampuan sumber daya manusia aparatur
			Arah Kebijakan Memberikan informasi kinerja SMART
			Arah Kebijakan Melakukan Penyusunan Perencanaan, Publikasi penyelenggaraan OPD dan Promosi Produk Perikanan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone merupakan pengejawantahan dari strategi dan arah kebijakan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan (2018 – 2023). Rencana program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan tugas dan fungsi dinas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota khususnya terkait urusan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone selama periode 2018 – 2023.

Pendanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone dengan mempertimbangkan kemampuan riil keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah untuk mencapai visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018 – 2023. Kerangka pendanaan juga dimungkinkan berasal dari APBD provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui program-program sektoral Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang relevan dengan pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Bone 2018 – 2023.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun 2018 – 2023 disajikan pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>), Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra(2023)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (juta)		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Tujuan 1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	2	2		3		4		5		6		6			
				Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap (%)	1	1		1,2		1,4		1,6		1,8		1,8			
				Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya(%)	3	4		5		6		7		8		8			
				Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	1	1		1,2		1,4		1,6		1,8		1,8			
				Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	46.746,90	47.681,83	1.810,40	49.112,29	2.057,74	51.075,78	2.227,01	53.630,62	2.410,29	56.848,46	2.608,73	258.348,98	11.114,17	
			Jumlah Produksi Kelompok Nelayan (Ton)	32.722,83	33.377,29		34.378,61		35.541,44		37.541,44		39.793,92		39.793,92	187049,33			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2023)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (juta)		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Persentase Jumlah Usaha Nelayan yang terfasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100		100			
			a. Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan yang terlatih (Orang)	30	30	91	30	100,1	30	110,11	30	121,121	30	133,23	150	555,56	Bidang Kenelayanan	
			b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Rehab TPI dalam setahun (Kegiatan)	1	1	49,7	1	54,67	1	60,137	1	66,15	1	72,75	5	303,41	UPT TPI	
			c. Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat bantuan (KUB)															
				Jumlah Kelompk Nelayan yang memperoleh Pendampingan/Penguatan Kelembagaan (KUB)	10	8	1.690	8	1.859	9	2.044,9	9	2.249,3	10	2.474,3	44	10.317,5	Bidang Kenelayanan	
			d. Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah operasional UPTD dalam pembinaan dan pengelolaan TPI(Kegiatan)	1	1	30	1	33	1	36,3	1	39,93	1	43,92	1	183,15	UPT TPI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2023)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (juta)		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			e. Pembinaan, Pendampingan dan Pencatatan Kapal Perikanan	Jumlah Penerbitan Pencatatan, Pendaftaran dan penandaan Kapal Perikanan (Kapal)	285	290	40,7	295	44,77	300	49,24	305	54,17	310	59,58	1.500	248,48	Bidang Jasa Usaha Perikanan	
			Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Persentase Jumlah Nelayan yang Terberdayakan (%)	100	100	150	100	165	100	181,50	100	199,65	100	19,615	100	915,77		
				Persentase Jumlah Usaha pembudidayaan ikan yang terfasilitasi (%)	100	100	150	100	165	100	181,5	100	199,65	100	219,615	100	915,77		
			a. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah nelayan yang terfasilitasi dengan mitra (orang)	20	20	150	25	165	25	181,50	27	199,65	30	219,62	127	915,77	Bidang Kenelayanan	
			b. Pembinaan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan yang terfasilitasi (Rekomendasi)	2	2	80	2	88	2	96,8	2	106,48	2	117,13	10	488,41	Bidang Jasa Usaha Perikanan	
			c. Pembinaan Pembudidayaan Ikan Skala Kecil	Jumlah Rekomendasi Penerbitan/Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan dan Pengangkutan Ikan Hidup (Rekomendasi)	50	50	70	50	77	50	84,7	50	93,17	50	102,48	250	427,35	Bidang Jasa Usaha Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2023)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (juta)		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	356.896,90	371.172,56	2.529,55	389.731,19	2.777,48	413.115,068	3.039,21	442.033,12	3.332,08	477.395,77	3.653,68	2.093.447,71	15.332		
				Jumlah Produksi Pokdakan (Ton)	248.964	261.412		274.483		288.207			302.617		317.748		1.444.467		
			a. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Jumlah Pokdakan yang memperoleh Pendampingan /Penguatan Kelembagaan (Pokdakan)	28	10	86,9	10	95,59	10	105,14	10	115,66	10	127,23	50	443,62	Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidayaan Ikan	
			b. Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Usaha Pembudidaya Ikan	Jumlah pembudidaya yang terfasilitasi dengan mitra (orang)	130	30	92,180	30	101,40	30	111,54	30	122,69	30	134,96	150	562,77	Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidayaan Ikan	
			c. Pengembangan benih/Bibit Ikan Unggul	Jumlah bibit yang ditebar (bibit)	0	4.000	110	4.000	121	4.000	133,1	4.000	146,41	4.000	161,05	20.000	671,56	Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			d. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah Pokdakan yang mendapat bantuan sarana dan prasarana dan penerapan CBIB (Pokdakan)	20	20	1.562	20	1.718,2	20	1.890	20	2.079	20	2.286	100	9.535,2	Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			e. Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Budidaya Perikanan	Jumlah benih ikan air tawar yang diproduksi (bibit)	665.000	671.650	300,45	678.367	330,50	685.150	363,55	692.002	339,90	698.922	439,89	3.426.091	1.774,29	UPT BBIPB	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2023)		Unit Kerja PD Penganggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (juta)		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			f. Pembinaan dan Pengembangan Kesehatan dan Lingkungan Perikanan	Jumlah pemantauan lokasi kesehatan ikan dan lingkungan perikanan (kali)	10	10	116,82	10	128,50	10	141,35	10	155,48	10	171,03	50	713,18	Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			g. Pembinaan Sumberdaya Manusia Pembudidaya, Pengolah dan Pemasar Ikan	Jumlah Pembudidaya yang mengikuti penguatan SDM (Orang)	30	30	68,200	30	75,020	30	82,522	30	90,774	30	99,851	150	416,36	Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidayaan Ikan	
			Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Persentase Jumlah Pengembangan Kawasan Berbasis Kluster (%)	100	100	900	100	1.000	100	1.100	100	1.200	100	1.300	100	5.500		
			a. Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penataan pengembangan kawasan berbasis kluster (budidaya, baik di air laut, payau maupun air tawar) (Dokumen)	1	1	900	1	1.000	1	1.100	1	1.200	1	1.300	5	5.500	Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
				Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun/diadakan di kawasan budidaya (Paket)	4	4		4		4		4		4		20			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2023)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp ((juta)			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Akuntabilitas Urusan Kelautan dan Perikanan			Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP (Inspektorat Daerah)	C	CC		B		B		B		BB		BB				Sekretariat
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan Administrasi perkantoran (%)		100	1.107,41	100	1.218,48	100	1.339,90	100	1.473,95	100	1.621,35	100	6.760,77			
			a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Air dan Listrik (Rekening)	132	96	258,50	96	284,35	96	312,79	96	344,06	96	378,47	480	1.578,17			
			b. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibarkan (paket) Kantor	33	33	22	33	24,2	33	26,620	33	29,282	33	32,210	165	134,31			
			c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	3	3	2,750	3	3,025	3	3,27	3	3,660	15	4,026	15	16,734			
			d. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan (Kali)	2	204	16,5	204	18,15	204	19,97	204	21,96	204	24,16	1.020	100,74			
			e. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun (kali)	90	432	366,86	432	403,55	432	443,90	432	488,29	432	537,12	2.160	2.239,72			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2023)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (juta)		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			f. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket)	36	36	147,24	36	161,97	36	178,16	36	195,98	36	215,58	180	898,93		
			g. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan rutin koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi kelingkat Nasional. Tingkat provinsi dan tingkat kabupaten yang diikuti (Kabupaten)	90	87	293,55	87	322,91	87	355,20	87	390,72	87	429,79	435	1.792,17		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana apatur (%)		100	584,99	100	700,19	100	767,73	100	844,50	100	928,96	100	3.826,37	Sekretariat	
			a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan (Unit)	4	0	-	1	35	1	35	0	-	0	-	2	70		
			b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Paket)		3	49,50	3	54,45	3	59,90	3	65,88	3	72,47	15	302,20		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2023)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (juta)		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (Paket)		5	0	5	54,45	5	59,90	5	65,88	5	72,47	25	252,70		
			d. Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur (Unit)		30	66	30	72,600	30	79,860	31	87,846	151	96,630	272	402,94		
			e. Kegiatan Pengadaan Mesin Kartu Absensi	Jumlah Pengadaan Mesin kartu absensi (Unit)	0	3	27,5	3	32,50	3	33,275	3	36,602	15	40,262	27	170,14		
			f. Kegiatan Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor (Paket)		3	200	3	220	3	242	3	266,2	3	292,82	3	1.221,02		
			g. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara dan terawat (Unit)	3	3	44	3	48,400	3	53.240	3	58.564	3	64.420,4	3	268,62		
			h. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional(Paket)	7	8	197,99	9	217,79	9	239,57	9	263,52	9	289,88	44	1.208,75		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur (%)	100	100	24,34	100	26,77	100	29,45	100	32,39	100	35,63	100	148,58	Sekretariat	
			a. Kegiatan Bimbingan Teknis	Jumlah aparat yang mengikuti bimtek dan latpim (Orang)	1	1	24,34	1	26,77	1	29,45	1	32,39	5	35,63	9	148,58		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2023)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (juta)		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan realisasi penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	68,42	100	75,26	100	82,79	100	91,07	100	100,17	100	417,71	Sekretariat	
			a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (Laporan)	4	4	68,42	4	75,26	4	82,79	4	91,07	4	100,17	20	417,71		
			Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan penunjang pemerintahan umum (%)	100	100	38,5	100	42,35	100	46,59	100	51,24	100	56,37	100	235,05	Sekretariat	
				Cakupan realisasi promosi produk perikanan (%)	100	100	79,2	100	87,12	100	95,83	100	105,42	100	115,97	100	483,54		
			a. Kegiatan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	4	6	33	5	36,30	6	39,93	5	43,92	5	48,32	27	201,47		
			b. Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan Website Perangkat Daerah (Paket)	1	1	5,5	1	6,05	1	6,66	1	7,32	1	8,05	5	33,58		
			c. Promosi dan pameran pembangunan	Jumlah Penyelenggaraan promosi produk perikanan yang diikuti (Pameran)	3	3	79,20	3	177,12	3	95,83	3	105,42	3	115,97	15	483,54		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja yang akan dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun 2018 – 2023 merupakan penyelenggaraan bidang urusan sektor kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi sub urusan perikanan tangkap seperti pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan serta sub urusan perikanan budidaya seperti penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan.

Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bone 2018 – 2023, disajikan pada Tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1 Indikator Tujuan/Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	2	3	4	5	6
			Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap (%)	1	1,2	1,4	1,6	1,8
			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	4	5	6	7	8
			Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya (%)	1	1,2	1,4	1,6	1,8
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan kelautan dan perikanan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP (Inspektorat Daerah)	CC	B	B	B	BB

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2018 – 2023 disusun untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan mengisi kekosongan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan setelah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone 2018 – 2023 berakhir. Rencana Kerja (Renja) OPD tahun 2024 (masa transisi) yang disusun pada tahun 2023 atau setelah Renstra tahun 2018-2023 berakhir, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Bone tahun 2005-2025 untuk tetap menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah. Namun Rencana Kerja masa transisi tersebut tetap merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis periode berikutnya (2023-2028).

Seluruh program dan kegiatan pada masa transisi ini diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum tercapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Program-program dimaksud bersifat tahunan atau tidak *multiyear* sehingga hasil dan dampaknya dapat di evaluasi pada akhir tahun perencanaan.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Unit Kerja dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun 2018-2023 sesuai tugas dan fungsinya.
2. Mengingat Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan, maka dokumen ini harus dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja OPD yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKA/DPA.
4. Penanggung jawab pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun 2018-2023 adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Renstra, Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone berkewajiban

untuk mengkoordinasikan penjabaran Renstra ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas.

5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun 2018-2023 dilakukan pada akhir periode renstra oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.
6. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun 2018-2023 harus dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone secara sungguh-sungguh, konsisten, disiplin, dan bertanggung jawab. Renstra ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder untuk turut terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Bone.